

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Bermula pada tahun 2004, Pemilihan Presiden di negeri ini dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia melalui sebuah proses yang disebut dengan Pemilihan Umum atau Pemilu. Sebelumnya, Pemilihan Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipilih melalui proses Pemilu. Pemilihan langsung merupakan salah satu interpretasi atas kedaulatan rakyat yang secara riil pada sistem kenegaraan. Pemilihan langsung oleh rakyat, merupakan siklus yang berawal dari rakyat dan kembali untuk rakyat. Oleh karenanya seorang pemenang pemilu merupakan sebagai cerminan yang ditunjuk dan dipilih langsung oleh rakyat.

Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum diselenggarakan dalam pemilihan umum Legislatif kemudian disusul pemilihan umum Presiden serta Wakil Presiden.

Pada pemilu legislatif tahun 2014 yang diwarnai dengan momen penting bagi Partai Politik (Parpol), mereka saling bersaing mengusung Calon Legislatif (Caleg) yang apabila terpilih akan menjadi perwakilan partai dalam Parlemen. Masing-masing Caleg partai politik bersaing agar bisa menembus kursi parlemen dengan mendapatkan suara terbanyak. Dalam hal ini fungsi atau peran pemasaran

politik sangat dibutuhkan, supaya strategi yang digunakan dapat tersusun dan berjalan dengan baik.

Setelah Pemilu Legislatif selesai, kemudian diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diikuti oleh dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yakni pasangan calon Prabowo-Hatta Rajasa yang diusung dari kumpulan partai-partai politik, menyebut namanya sebagai Koalisi Merah Putih (KMP). Sedangkan pasangan calon lainnya ialah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung juga dari Partai Politik, dan menyebut namanya Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kemenangan pasangan Jokowi-JK merupakan salah satu dampak dari sebuah hasil dari Pemilu Legislatif, dalam artian dukungan penuh suara partai memberikan pengaruh dan berdampak pada hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Seperti halnya yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta, hasil rekapitulasi perolehan suara Pileg tahun 2014 ditetapkan melalui surat keputusan KPU Nomor 411/ KPTS/ KPU/ 2014 tentang Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara umum dalam Pemilu, hasil perolehan suara Pileg tahun 2014 menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di posisi pertama dengan perolehan suara sebanyak 23.681.471 atau 18,95%.

Kembali pada Pileg, berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU DIY mencatat hanya dua partai politik yang berhasil meraih kursi di DPR RI secara murni, yakni PDIP dan Partai Amanat Nasional (PAN). PDIP mendapatkan 2

kursi, sedangkan PAN mendapatkan 1 kursi dengan total suara sebanyak 355.787 suara. Merujuk data (Zakaria, 2014), legislator yang meraih kursi di DPR RI adalah Idham Samawi (120.796 suara) dan Esti Wijayati (99.440 suara) dari PDIP, sedangkan dari PAN ialah Hanafi Rais (197.915 suara). Kemenangan PDIP pada Pileg dan Pilpres tersebut memang bisa juga menjadi dasar perencanaan strategi pada pemilu lainnya, seperti Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Namun, penelitian ini tidak difokuskan kepada PILKADA, melainkan pada Pileg tahun 2014.

Tabel 1.1 Hasil Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2011

Pasangan calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
Haryadi Suyuti-Imam Priyono (HATI)	97.047	48.3
Ahmad Hanafi Rais – Tri Harun Ismaji (FITRI)	84.122	41.9
Zuhrif Huda-a-Aulia Reza	19.557	9,7

Sumber : Putra (2011)

Dalam konteks Pilkada Kota Yogyakarta, peneliti mengambil kasus Pilkada pada tahun 2011. Dari ketiga Pasangan Calon (Paslon) walikota dan wakil walikota kemarin, dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3 yaitu Suyuti dengan Imam Priyono, Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota, Paslon Haryadi Suyuti-Imam Priyono (HATI) memperoleh 97.047 suara atau 48.3 % di 14 kecamatan. Sementara itu pasangan Ahmad Hanafi Rais – Tri Harun Ismaji (FITRI) memperoleh 84.122 suara atau 41.9 %. Disusul pasangan nomor 1 yakni Zuhrif Huda-a-Aulia Reza di posisi ketiga dengan jumlah suara sebanyak 19.557 atau 9,7 % (Putra, 2011).

Menarik sekali bila mengamati hasil suara ini, dimana pasangan calon Haryadi-Imam yang merupakan calon dari PDIP yang berkoalisi dengan Golkar

memenangkan pertarungan dengan hanya dukungan dua partai itu sendiri. Padahal, melihat dari pasangan-pasangan lain yang masing-masing diusung atau didukung oleh banyak partai atau lebih dari dua partai.

Sehingga, kemenangan Haryadi Suyuti dan Imam Priyono dari PDIP di Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah basis Muhammadiyah adalah suatu pencapaian strategi politik yang tentu sangat mengagetkan. Sebab, melihat kebalakang pada dua periode, periode 1995-2000 dan 2001-2006 PDIP dengan mengusung calonnya tidak pernah memenangkan pertarungan pilkada di wilayah Kota Yogyakarta. Sebagaimana dirincikan pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2. Perolehan Kursi DPRD Kota Yogyakarta Oleh PDIP

No	Tahun Pemilu	Perolehan Kursi
1	Pemilu 1999	15 Kursi
2	Pemilu 2004	11 Kursi
3	Pemilu 2009	11 Kursi
4	Pemilu 2014	15 Kursi

Sumber: Data Diolah oleh Penulis Dari Berbagai Sumber (2018).

Perolehan kursi pada legislatif ini memang tidak membuat jaminan PDIP menang pada Pilkada di Kota Yogyakarta. Dua sisi yang berbeda, penguasaan penuh pada Legislatif dipegang oleh PDIP, sedangkan PAN menguasai wilayah Eksekutif Kota Yogyakarta. Begitupun juga yang terjadi pada kasus Pilkada Serentak tahun 2017 di Kota Yogyakarta kemarin, yang di ikuti oleh dua Paslon, yaitu Paslon nomor urut 1 Imam Priyono D. Putranto dan Achmad Fadli, yang diusung oleh dua partai yaitu PDIP dan Nasdem. Sedangkan Paslon nomor urut 2 Haryadi-Heroe diusung oleh enam parpol, yakni Golkar, PAN, PKS, Gerindra, Demokrat dan PPP. Pada Pilkada serentak di Kota Yogyakarta 2017 tersebut dibuktikan dengan menangnya pasangan calon Haryadi-Heroe, diketahui bahwa

sebelumnya Haryadi merupakan walikota petahana. Sehingga, Pilkada serentak tersebut menjawab bahwa wilayah eksekutif tidak dapat dikuasai oleh PDIP sebagai partai tunggal maupun partai yang berkoalisi.

PDIP yang menang di Pileg dan Pilpres tahun 2014 secara telak di lima Kabupaten dan Kota di DIY ternyata juga gagal pada Pilkada tahun 2017 di Gunungkidul, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sejarah Pemilu di Kota Yogyakarta, PDIP memang cukup dominan pada Pileg dengan mendapatkan kursi yang cukup banyak. Namun kemenangan di Pileg tidak mampu membantu banyak untuk Pilkada Kota Yogyakarta kemarin. Oleh karenanya, hal ini cukup menarik untuk diteliti, mengapa PDIP pada Pileg tidak mampu mendongkrak pada Pilkada Kota Yogyakarta atau wilayah Eksekutif, yang sedangkan PDIP selalu mendapat suara terbanyak atau kursi terbanyak di Legislatif.

Berbeda dengan yang dialami Partai Amanat Nasional, pada Pileg tidak mampu menunjukkan dominannya namun pada Pilkada sebagian besar selalu menang. Bila melihat kondisi sosial masyarakat, Kota Yogyakarta merupakan daerah dimana organisasi keagamaan Muhammadiyah pertama kali didirikan. Sehingga pengaruh dari Muhammadiyah berimplikasi pada percaturan politik di Kota Yogyakarta. Diketahui bersama bila organisasi Muhammadiyah memiliki kedekatan dengan PAN, dapat dilihat dari beberapa tokoh Muhammadiyah yang memiliki posisi strategis di Partai itu sendiri.

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, dapat ditarik kesimpulan bila PDIP merupakan partai yang dapat memenangi pertarungan di Pileg Kota

Yogyakarta, namun tidak dapat memenangkan pada kontes Pilkada. Kemudian, jika melihat basis wilayah dalam hal ini ialah Kota Yogyakarta. Maka, seharusnya PAN memiliki pengaruh dalam perolehan kursi di pertarungan Pileg pada Tahun 2014 kemarin. Lalu timbulah pertanyaan: bagaimana strategi politik yang dibangun oleh PDIP sehingga ia dapat memenangkan pertarungan politik Pileg yang notabene wilayah Yogyakarta merupakan basis partai-partai Islam. Oleh karena itu, menarik sekali untuk melakukan penelitian tentang PDIP dan strategi politiknya, dalam hal ini konteks "*Marketing Politik*". Sehingga, peneliti mengusung tema penelitian dengan judul "*Marketing Politik DPC PDIP Kota Yogyakarta pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014*".

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Marketing Politik DPC PDIP Kota Yogyakarta dalam menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2014?

## **I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **I.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latarbelakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Marketing Politik DPC PDIP Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014.

- b. Menganalisis kemenangan PDIP Kota Yogyakarta dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014.

### **I.3.2. Manfaat Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat menambah wawasan intelektual ilmu pengetahuan bagi disiplin ilmu pemerintahan.
- b. Penelitian ini memberikan sumbangan kepada penelitian-penelitian yang akan datang apabila akan mengadakan penelitian yang serupa maupun yang akan melanjutkan penelitian ini.